

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang Mahkamah Kosntitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Mujahidin. 2007. Peradilan Satu Atap di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

Ahmad Syahrizal. 2006. Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bagir Manan. 2011. Negara Hukum yang Berkeadilan. Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Bahder Johan Nasution. 2012. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2006. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. CV. Kita, Surabaya.

Christopher Wolfe. 1997. Judicial Activism: Bulwark of Freedom or Precarious Security?, Boston, Rowman & Littlefield.

Fatmawati. 2005. Hak Menguji (*Toetsingrecht*) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.

H.A.S. Natabaya. 2008. Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jarak dan langkah Pemikiran Hakim Konstitusi Prof.

Dr. H.A.S. Natabaya, S.H, L.L.M, Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mhakamah Konstitusi, Jakarta.

I Dewa Gede Palguna. 2008. Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, dan *Welfare State*, Sekretariat Jendrel dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Jazim Hamidi dkk (Green Mind Community). 2009. Teori dan Politik Hukum
Tata Negara. Total Media, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, et al. 2006. Gagasan Amandemen UUD 1945
Pemilihan Presiden secara Langsung. Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2007. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer.
The Biography Institute, Bekasi.

_____. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi
Press (Konpress), Jakarta.

_____. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
Jakarta

_____. 2010. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan
Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Jakarta.

_____. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara,
Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

_____. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

_____. 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia, Malang.

I.P.M Ranuhandoko. 2000. Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Marbun SF. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Liberty, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S.2007. Ilmu Perundang-Undangan (1), Kanisius, Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2008. DasarDasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, Gramedia, 2008

Maruarar Siahaan. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

_____. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua). Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Mahfud MD. 2001. Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Mahfud MD. 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi, cetakan pertama. LP3ES, Jakarta.

Muchammad Ali Safa'at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati dkk. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Munir Fuady. 2007. Dinamika Teori Hukum,. Ghalia Indonesia, Bogor.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Penerbit Nusa Media, Bandung.

Otis H. Stephens Jr., John M. Scheb. 2008. American constitutional Law Volume I: Source of Power and Restraint, Thomson Wadsworth, Belmont.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2006. Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Soerjono Soekanto. 2004. Penelitian Hukum Normatif, cetakan kedelapan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusomo. 2008. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.

Internet :

Ali, Jimly Sarankan LPSK Lebih Progresif Jangan mengeluh dengan aturan yang ada, www.hukumonline.com

Djatmiko Anom Husodo, Perspektif Teoritis Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Implementasinya Dalam Undang - Undang Nomor

48 Tahun 2009, <http://lppm.upi.edu/files/2013/05/Lampiran2->

[Contoh-Isian-Template Konsideratum Jurnal dan Peradilan.pdf](#)

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,

www.jimly.com.

Miftakhul Huda, Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang,

<http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam->

[pengujian-undang.html](#).

Mahfud MD. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional

Warga Negara.

http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf

Manfrizal, Bandul Kekuasaan Negara,

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6692&coid=3&c

[aid=21&gid=2](#)

Martitah, Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan MK Yang

Bersifat Mengatur, Disertasi Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro Tahun 2011, dalam artikel "Putusan MK dari *negative*

legislator ke positive legislator", www.portalgaruda.org

Muchamad Ali Safa'at, Penafsiran Konstitusi,

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/PenafsiranKonstitusi.pdf>

Pan Mohamad Faiz, Konstitusi dan Aktivisme Yudisial,

<http://panmohamadfaiz.com/>

Saldi Isra, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Isi,

Implikasi dan Masa Depan Komisi Yudisial),

<http://www.saldiisra.web.id>

Jurnal/Makalah :

A.Fickar Hadjar, dkk. 2003. Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, Jakarta

Arief Hidayat, Prinsip *Ultra Petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, Makalah disampaikan pada saat fit and proper test dihadapan Komisi III DPR RI, tanggal 27 februari 2013

Dian Rositawati. 2005. *Judicial Review*, Bahan bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Dody Haryono, Perdebatan Hukum Penerapan *Ultra Petita* dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Jimly Asshiddiqie. 2006. Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Jimly Asshiddiqie, Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang “Judicial Review” atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999.

Jyoti Ramakant Navelkar F.Y. LLM, Judicial Restraint and Judicial Activism,
Subject- Legal Theory- Ii G.R.Kare College of Law.

Mahkamah Konstitusi RI. 2004. Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan
Terpercaya, Jakarta.

Malik. 2009. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final
Dan Mengikat, Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 6, No 1.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi. Menjaga Independensi Menyosong
Pemilu 2014, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.

Pan Mohamad Faiz, Mengawal Demokrasi Melalui *Constitutional Review*:
Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi.
disampaikan dalam buku "UI untuk Bangsa 2009".

Refleksi Kinerja MK 2009 dan Proyeksi 2010. Mengawal demokrasi Menegakkan
keadilan Substantif. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Jakarta.

Yance Arizona. Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah
Konstitusi. Jakarta, Peneliti pada Perkumpulan untuk Pembaharuan
Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

Yohanes Usfunan, Saldi Isra, dkk. Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.
005/PUU-IV/2006.

Skripsi/Thesis/Disertasi :

Rafiuddin, Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian

Undang-Undang Yang Lebih Dari Sekali (Studi atas Putusan MK

Tahun 2003-2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ach. Rubaie. 2015. Putusan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, Tidak Diterbitkan.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang

Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006
tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

Putusan MK Nomor Perkara 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang
undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan
Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

